

EKONOMI BIRU **UNTUK** INDONESIA EMAS

ANDA BERADA DI KAWASAN
ZONA INTEGRITAS
BADAN MUTU KKP LAMPUNG

EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

KKP
2025
pangan



RENCANA KERJA BALAI KIPM LAMPUNG 2025

TOLAK & LAPOR

GRATIFIKASI



"Bantu Kami Dengan Tidak Memberikan Hadiah
atau Barang Termasuk Bingkisan/Parsel/Hampers dan Sajian
yang Dapat Diindikasikan Gratifikasi atau Suap"

LAPOR GRATIFIKASI KE <https://gol.kpp.go.id>

STOP 

Suap
Pungli
Gratifikasi

BADAN MUTU KKP LAMPUNG

BerAKHLAK

BADAN MUTU KKP LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (Balai KIPM Lampung) sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong” maka Balai KIPM Lampung menetapkan misi yaitu :

1. Pelayanan sertifikasi mutu produksi primer (CPIB, CBIB, CPIB, CPPIB, CPOB, CDOIB) dan sertifikasi mutu pasca panen (SKP, HACCP, SPDI), pengujian laboratorium dan inspeksi secara profesional berbasis penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17020:2012 secara konsisten.
2. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang berdaya-saing melalui inspeksi, sertifikasi, surveilen, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring (penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan).
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai KIPM Lampung Tahun 2025, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran strategisnya di tahun 2025. Sebagai upaya yang dilakukan oleh Balai KIPM Lampung untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan RKT 2025 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai KIPM Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2025. RKT ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Balai KIPM Lampung di tahun kedepannya.

Demikian RKT Balai KIPM Lampung Tahun 2025 disusun supaya dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025
Kepala Balai KIPM Lampung



Ashari Syarief, S.Pi, M.P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
Pendahuluan.....	6
Latar Belakang.....	6
Tugas dan Peran Organisasi	6
Tujuan	8
Manfaat.....	9
Sasaran.....	9
Rencana Kinerja Tahunan	10
Rencana Strategis, Visi dan Misi.....	10
Arah Kebijakan.....	13
Sasaran Strategis BPPMHKP dan Indikator Kinerja	13
Penutup.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja BKIPM TA 2024.....	16
Tabel 2. Indikator Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahun 2025	18
Tabel 3. Alokasi anggaran perkegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Balai KIPM Lampung tahun 2025.....	22

Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2025–2029 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BKIPM 2025 – 2029 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dibidang Kelautan dan Perikanan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Balai KIPM Lampung 2025-2029, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang tetap harus

menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen diatasnya (Renstra, RPJMN).

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara dan Perpres ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu perubahan dari Perpres No. 02 Tahun 2017 tentang pengesahan pembaharuan dan pembentukan BKIPM menjadi Perpres No. 38 Tahun 2023 dalam Organisasi dan Tata Kerjanya, KKP tetap mempertahankan unsur pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis dari pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjaga serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan disetiap rantai pasok melalui quality assurance, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelautan dan hasil perikanan Indonesia. Dengan demikian peranan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di

pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang BPPMHKP yang mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi inspeksi dan surveillance. Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu Balai KIPM Lampung sebagai UPT BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan program KKP melalui ekonomi biru. Dengan demikian peran UPT Balai KIPM Lampung cukup strategis dalam rangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor dan antar area komoditi perikanan yang lancar, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Balai KIPM Lampung Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2025.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Balai KIPM Lampung pada tahun 2025.

Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Balai KIPM Lampung dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2025. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2025.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Balai KIPM Lampung adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Balai KIPM Lampung Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari RPJM Balai KIPM Lampung tahun 2025 - 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) BKIPM Tahun Anggaran 2025 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Balai KIPM Lampung pada tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden “Menyelenggarakan dan Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 – 2029, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.

2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative,
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BPPMHKP.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/permen-kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa pengembangan sistem pengendalian mutu serta pengawasan keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui :

- a) Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen,
- b) Pengawasan mutu domestik (pelabuhan perikanan, pasar tradisional dan pasar modern)
- c) Peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor
- d) Peningkatan kapasitas SDM pengendalian mutu, prasarana dan sarana laboratorium penguji dan lembaga inspeksi
- e) Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu (domestik, impor dan ekspor).

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan oleh pengawasan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP maka ditetapkanlah misi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yaitu: “Mewujudkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang efektif dan selaras dengan standar

internasional yaitu Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BPPMHKP tahun 2025 adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang perkarantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya PerPres Nomor 38 Tahun 2023 tentang BPPMHKP telah memperluas cakupan fungsinya dalam penyelenggaraan jaminan mutu, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan PerPres Nomor 38 Tahun 2023, tujuan penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pengelolaan sistem ketertelusuran dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

3. Pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan inspeksi pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
6. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh uji, penerbitan sertifikat serta surveilans pada sertifikasi mutu produksi sumberdaya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Arah kebijakan dan strategi BPPMHKP tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BPPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan

kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.
4. Mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai BPPMHKP – KKP
5. Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian laboratoris, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.

8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025- 2029, maka sasaran kegiatan dan kondisi *outcome/impact* yang ingin dicapai Balai KIPM Lampung telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, oleh karena itu Balai KIPM Lampung telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Rencana Kerja 5 Tahunan (RENSTRA) tahun 2025 - 2029 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja Balai KIPM Lampung TA 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KERJA KEGIATAN		TARGET 2024
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Lampung (laporan)	10
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Traceability	3
			lingkup Balai KIPM Lampung (UPI)	
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Lampung (Produk)	15
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem jaminan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Lampung (UPI)	9
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Lampung (Nilai)	84
		6	Laporan usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Lampung (Laporan)	1
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Lampung (Indeks)	84
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)	85

		9	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Lampung (%)	100
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Lampung (%)	75
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)	93,75
		12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)	82
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Lampung (%)	77,5
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Lampung	77,5

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Balai KIPM Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2. Indikator Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KERJA KEGIATAN		TARGET 2025
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	70
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT (%)	99
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	75
	kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai kualitar penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	92
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT BKIPM Lampung (Nilai)	71,2
		8	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	100

	9	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	87
	10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Indeks)	86
	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	85
	12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	76
	13	Perentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	70
	14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KPIM Lampung (Nilai)	88

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan UPT . Adapun kegiatan dalam program pengembangan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pengembangan dan pembinaan pengawasan mutu perikanan dilaksanakan

dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan mutu perikanan sesuai standard dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. Jaminan kesehatan ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman penyebaran HPI/HPIK.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotic pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea,

China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (traceability) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

Rencana Kerja Balai KIPM Lampung tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Balai KIPM Lampung tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 6.959.835.000,-**. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai KIPM Lampung untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refocusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Balai KIPM Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan Balai KIPM Lampung Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	6.489.853.000
2.	Manajemen Mutu	135.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	335.000.000
Total Anggaran Balai KIPM Lampung Tahun 2025		6.959.853.000

Penutup

Rencana kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada TA 2025 ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Balai KIPM Lampung antara lain :

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Total rencana alokasi anggaran per kegiatan Balai KIPM Lampung pada tahun 2025 sebesar **Rp. 6.959.853.000,-**. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Hasil kelautan dan Perikanan Sebesar **Rp. 6.489.853.000,-**
2. Manajemen Mutu sebesar **Rp. 135.000.000,-**
3. **Pengendalian** dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp. 335.000.000,-**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ashari Syarief**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Lampung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ashari Syarief

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN LAMPUNG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	1
		4.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	1
		5	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	75
		7.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	92
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	71,5
		10.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	100
		11.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Indeks)	87
		12.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	86
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	85

		14	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	76
		15	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	70%
		16	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Rp. 6.489.853.000
2.	Manajemen Mutu	Rp.135.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Rp. 335.000.000
Total Anggaran Balai KIPM Lampung Tahun 2024		Rp. 6.959.853.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Lampung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ashari Syarief

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649615) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG
ALOKASI Rp. 6,959,853,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMPI/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
032.13.EC 3989 3989.BIA	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	 1.0 Produk, Laporan, Keputusan		470,000,000 335,000,000 5,000,000		
3989.BIA.001 051 A 521211	Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan INVESTIGASI KASUS PENAHANAN/PENOLAKAN PRODUK PERIKANAN Belanja Bahan	1.0 Produk		5,000,000 5,000,000 5,000,000	U	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)			440,000	2	PNP
	- ATK/Komputer Supplies	1.0 PKT	440,000	440,000	*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			4,560,000	A	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Perjalanan Investigasi	12.0 OH	380,000	4,560,000	*	
3989.PDC	Sertifikasi Produk[Base Line]	40.0 produk, Sertifikat		90,000,000		
3989.PDC.002 051 A 521211	Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi Validasi produk pada sektor produksi pasca panen PROSENTASE SERTIFIKAT PENERAPAN DISTRIBUSI IKAN (SPDI) YANG TERSERTIVIFIKASI SPDI Belanja Bahan	40.0 produk		90,000,000 90,000,000 25,440,000	U	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)			360,000		RM
	- ATK/Komputer Supplies	1.0 PKT	360,000	360,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			25,080,000		RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Perjalanan Inspeksi/Survailan/Verifikasi SPDI [2 orang x 1 HARI x 33 KALI]	66.0 OK	380,000	25,080,000		
B	PROSENTASE SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGELOLAAN (SKP) DITERBITKAN PADA UNIT PENGOLAHAN IKAN SKALA UMKM DAN MENENGAH BESAR SERTIFIKASI SKP			30,000,000		
521211	Belanja Bahan			360,000	2	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- ATK/Komputer Supplies	1.0 PKT	360,000	360,000	*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			29,640,000	A	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Perjalanan Inspeksi / Verifikasi/Survailan SKP [2 ORG x 39 KALI x 1 HARI]	78.0 OK	380,000	29,640,000	*	
C	JUMLAH SERTIFIKAT HAZARD ANALISIS CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) RUANG LINGKUP PRODUK PADA UPI (sertifikat)			20,880,000		
521211	Belanja Bahan			360,000		RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- ATK/Komputer Supplies	1.0 PKT	360,000	360,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(032)
(13)
(649615)
Rp. 6,959,853,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.017-Bandar Lampung) - Perjalanan Dalam Rangka Inspeksi/Verifikasi/Surveilan HACCP [2 ORG x 27 KALI x 1 HARI] D SOSIALISASI SPDI PADA PELAKU USAHA	54.0 OH	380,000	20,520,000 20,520,000 4,560,000	RM
521211	Belanja Bahan (KPPN.017-Bandar Lampung) - ATK/Komputer Supplies - Konsumsi - Snack	1.0 PKT 50.0 PKT 100.0 PKT	460,000 42,000 20,000	4,560,000 460,000 2,100,000 2,000,000	RM
E	IN-House Traning Inpektur Mutu			9,120,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.017-Bandar Lampung) - Tiket - Uang Harian - Penginapan			9,120,000 6,000,000 1,720,000 1,400,000	RM
3989.PDF	Sertifikasi Lembaga[Base Line]	32.0 Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat		170,000,000	
3989.PDF.002	Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	32.0 Lembaga		170,000,000	
051	Validasi Sertifikasi Produksi Primer			170,000,000	U
A	SERTIFIKASI CBIB PADA PEMBUDIDAYAAN IKAN			30,960,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.017-Bandar Lampung) - ATK/Komputer Supplies	1.0 PKT	560,000	560,000	2 PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.017-Bandar Lampung) - Perjalanan Sertifikasi CBIB	80.0 OH	380,000	30,400,000	A PNP
B	SETIFIKASI CPIB PADA PEMBENIHAN			30,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.017-Bandar Lampung) - ATK/Komputer Supplies	1.0 PKT	360,000	360,000	2 PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.017-Bandar Lampung) - Perjalanan Inspeksi CPIB Pembenihan	78.0 OH	380,000	29,640,000	RM
C	SERTIFIKASI CPPIB			14,040,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.017-Bandar Lampung) - ATK/Komputer Supplies	1.0 PKT	360,000	360,000	2 PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(649615)

Rp. 6,959,853,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMPI/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			13,680,000	A	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Perjalanan Inspeksi CPPIB	36.0 OH	380,000	13,680,000	*	
	<i>SERTIFIKASI CPIB KAPAL PERIKANAN</i>			50,000,000		
D						
521211	<u>Belanja Bahan</u>			600,000	2	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- ATK/Komputer Supplies	1.0 PKT	600,000	600,000	*	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			49,400,000	A	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Perjalanan Sertifikat CPIB Kapal Perikanan	130.0 OH	380,000	49,400,000	*	
E	<i>MONITORING CEMARAN PERAIRAN</i>			26,000,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u>			520,000	2	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- ATK/Komputer Supplies	1.0 PKT	520,000	520,000	*	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			640,000		RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Pembelian Sample	2.0 PKT	320,000	640,000		
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			16,000,000		RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Subkontrak Pengujian	2.0 PKT	8,000,000	16,000,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			8,840,000		RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Perjalanan Monitoring Cemaran Perairan	18.0 OH	380,000	6,840,000		
	- Transportasi Laut	2.0 OK	1,000,000	2,000,000		
F	<i>SOSIALISASI SERTIFIKASI SEKTOR PRODUKSI PRIMER</i>			9,200,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u>			9,200,000		RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- ATK/Komputer Supplies	2.0 PKT	500,000	1,000,000		
	- Konsumsi	100.0 PKT	42,000	4,200,000		
	- Snack	200.0 PKT	20,000	4,000,000		
G	<i>BIMTEK TOT PRODUKSI PRIMER</i>			9,800,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			9,800,000		RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Tiket	2.0 OT	3,000,000	6,000,000		
	- Uang Harian	4.0 OH	500,000	2,000,000		
	- Uang Harian Fullboard	4.0 OH	130,000	520,000		
	- Penginapan	2.0 OH	640,000	1,280,000		
3989.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	2.0 Produk, Laporan, Keputusan		50,000,000		
-----	Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG					

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649615) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG
ALOKASI Rp. 6,959,853,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
3989.QIA.001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	2.0 Produk		50,000,000		
051	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik			50,000,000	U	
A	PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DOMESTIK			50,000,000		
521211	Belanja Bahan			5,440,000	2	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- ATK/Komputer Supplies	1.0 PKT	440,000	440,000	*	
	- Bahan Monitoring/Uji	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	*	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			9,000,000	2	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Pembelian Sample	30.0 PKT	300,000	9,000,000	*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			27,460,000	A	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Tiket	2.0 OT	4,500,000	9,000,000	*	
	- Uang Harian	6.0 OH	530,000	3,180,000	*	
	- Penginapan	4.0 OH	400,000	1,600,000	*	
	- Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik [6 Lokus x 3 Orang x 2 Kali]	36.0 OH	380,000	13,680,000	*	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			8,100,000	A	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Pengawasan Mutu hasil Perikanan Domestik Kota Bandar Lampung	54.0 OH	150,000	8,100,000	*	
3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]	20.0 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan		20,000,000		

3989.QIC.002	Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG	20.0 Lembaga		20,000,000		
051	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			20,000,000	U	
A	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			20,000,000		
	SURVAILAN KE UPI DALAM RANGKA PENERAPAN HACCP			20,000,000		
521211	Belanja Bahan			420,000	2	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- ATK/Komputer Supplies	1.0 PKT	420,000	420,000	*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			17,480,000	A	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Perjalanan Suveilan dalam Rangka Penerapan GRADE A	20.0 OH	380,000	7,600,000	*	
	- Perjalanan Suveilan dalam Rangka Penerapan GRADE B	26.0 OH	380,000	9,880,000	*	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2,100,000	A	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Perjalanan Suveilan dalam Rangka Penerapan HACCP	14.0 OK	150,000	2,100,000	*	
7010	Manajemen Mutu			135,000,000		
7010.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		6,000,000		

	Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG					

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(032)
(13)
(649615)
Rp. 6,959,853,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMPI/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
7010.ABR.001 052 A 521211 524111 7010.DCC	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor	1.0 Rekomendasi Kebijakan		6,000,000		
	MONITORING DAN EVALUASI UPI YANG MEMENUHI PERSYARATAN EKSPOR			6,000,000	U	
	Belanja Bahan			300,000	2	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- ATK/Komputer Supplies	1.0 PKT	300,000	300,000	*	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5,700,000	A	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Perjalanan Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi UPI	15.0 OH	380,000	5,700,000	*	
	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Orang, Kegiatan		8,000,000		

7010.DCC.001 051 A 524111 7010.PBR	Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG					
	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	1.0 Kegiatan		8,000,000		
	Peningkatan kompetensi inspektur mutu			8,000,000	U	
	IN HOUSE TRAINING INSPEKTUR MUTU			8,000,000		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8,000,000	A	PNP
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Tiket	1.0 OT	5,870,000	5,870,000	*	
	- Uang Harian	2.0 OH	400,000	800,000	*	
	- Uang Harian Fullboard	1.0 OH	130,000	130,000	*	
	- Penginapan	2.0 OH	600,000	1,200,000	*	
Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		60,000,000			

7010.PBR.001 051 A 521211 521219 522191	Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG					
	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1.0 Rekomendasi Kebijakan		60,000,000		
	Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji			60,000,000	U	
	PENAMBAHAN RUANG LINGKUP PARAMETER UJI YANG TERAKREDITASI			60,000,000		
	Belanja Bahan			380,000		RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- ATK/Komputer Supplies	1.0 PKT	380,000	380,000		
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			1,500,000		RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Uji Profiensi/Uji Banding	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000		
	Belanja Jasa Lainnya			54,000,000		RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)					
	- Biaya Kalibrasi Alat Laboratorium	1.0 PKT	42,000,000	42,000,000		
- Biaya Asesmen	2.0 OH	3,500,000	7,000,000			
- Biaya Pendaftaran	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000			

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649615)	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG
ALOKASI	Rp. 6,959,853,000	

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Tiket - Uang Harian - Uang Harian Fullboard - Penginapan	 1.0 OT 2.0 OH 2.0 OH 2.0 OH	 1,800,000 380,000 130,000 650,000	4,120,000 1,800,000 760,000 260,000 1,300,000	A * * * *	PNP
7010.PDD	Standarisasi Lembaga[Base Line]	2.0 Lembaga, Unit Kerja		53,000,000		
7010.PDD.001	Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	1.0 Lembaga		25,000,000		U
051	Penerapan Standar Metode Pengujian			25,000,000		
A	SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU			25,000,000		
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Biaya Sertifikasi ISO 9001	 1.0 PKT	 25,000,000	25,000,000 25,000,000	2 *	PNP
7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	1.0 Lembaga		28,000,000		
051	Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			28,000,000	U	
A	UNIT PELAKSANA TEKNIS BPPMHKP YANG TERAKREDITASI MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM ISO 17020			28,000,000		
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Iuran Tahunan KAN 17020	 1.0 PKT	 1,500,000	1,500,000 1,500,000		RM
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Biaya Survailan - Biaya Tanggung Gugat	 4.0 PKT 1.0 PKT	 3,500,000 2,920,000	16,920,000 14,000,000 2,920,000		RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Tiket - Uang Harian - Uang Harian Fullboard - Penginapan	 2.0 OK 3.0 OH 3.0 OH 4.0 OH	 2,000,000 530,000 130,000 900,000	9,580,000 4,000,000 1,590,000 390,000 3,600,000		RM
7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	1.0 Produk, Laporan, Keputusan		8,000,000		
7010.QIA.001	Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	1.0 Produk		8,000,000		U
051	Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance			8,000,000		
A	RAPAT KOORDINASI QUALITY ASSURANCE			8,000,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(649615)

Rp. 6,959,853,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Tiket - Uang Harian - Uang Harian Fullboard - Penginapan	 1.0 OT 2.0 OH 2.0 OH 2.0 OH	 4,880,000 530,000 130,000 900,000	8,000,000 4,880,000 1,060,000 260,000 1,800,000	A * * * *	PNP
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen			6,489,853,000		
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan			6,489,853,000		
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		6,420,148,000		

3987.EBA.962	Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG Layanan Umum	1.0 Layanan		99,705,000	U	
051	Layanan Umum dan Rumah Tangga			99,705,000		
A	Administrasi Kantor			7,780,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - ATK - Konsumsi Rapat Pemusnahan Arsip [15 ORG x 1 Kali]	 1.0 PKT 15.0 OK	 400,000 64,000	1,360,000 400,000 960,000		RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Bahan Pendukung Penataan Arsip	 1.0 PKT	 1,000,000	1,000,000 1,000,000		RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) > Perjalanan Kearsipan - Tiket - Uang Harian - Uang Harian Fullboard - Penginapan	 1.0 OK 2.0 OH 2.0 OH 3.0 OH	 2,300,000 530,000 130,000 600,000	5,420,000 5,420,000 2,300,000 1,060,000 260,000 1,800,000		RM
B	SOSIALISASI DAN KOORDINASI			32,425,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - ATK/Komputer Supplies - Makan Rapat Biasa LAMPUNG - Snack Rapat Biasa LAMPUNG	 2.0 PKT 100.0 OK 100.0 OK	 2,662,500 43,000 21,000	11,725,000 5,325,000 4,300,000 2,100,000		RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Belanja Bahan Pendukung Arsip Kepegawaian	 1.0 PKT	 1,000,000	1,000,000 1,000,000		RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(649615)

Rp. 6,959,853,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			7,000,000	RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	7.0 OJ	900,000	6,300,000	
524111	- Honorarium Moderator	1.0 OK	700,000	700,000	RM
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			12,700,000	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
D	> Perjalanan Mengikuti Uji Kompetensi			12,700,000	
	- Tiket	2.0 OT	2,000,000	4,000,000	
	- Uang Harian	8.0 OH	562,500	4,500,000	
521211	- Penginapan	6.0 OH	700,000	4,200,000	RM
	<i>Sekretariat PBJ</i>			6,420,000	
	<u>Belanja Bahan</u>			500,000	
524111	(KPPN.017-Bandar Lampung)				RM
	- ATK/Komputer Supplies	1.0 PKT	500,000	500,000	
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			5,920,000	
E	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	> Perjalanan Mengikuti Bimtek			5,920,000	
	- Tiket	1.0 OK	2,800,000	2,800,000	
521211	- Uang Harian	2.0 OH	530,000	1,060,000	RM
	- Uang Harian Fullboard	2.0 OH	130,000	260,000	
	- Penginapan	3.0 OH	600,000	1,800,000	
524111	<i>Layanan Umum</i>			21,440,000	RM
	<u>Belanja Bahan</u>			9,600,000	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
521211	- Bahan Pendukung	12.0 BLN	800,000	9,600,000	RM
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			11,840,000	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
I	> Perjalanan Rekonsiliasi Petugas BMN			11,840,000	
	- Tiket	2.0 OK	2,500,000	5,000,000	
	- Uang Harian	4.0 OH	530,000	2,120,000	
522151	- Uang Harian Fullboard	4.0 OH	130,000	520,000	RM
	- Penginapan	6.0 OH	700,000	4,200,000	
	<i>PENINGKATAN KAPASITAS BUILDING</i>			18,440,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			7,200,000	RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Instruktur	12.0 BLN	600,000	7,200,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(032)
(13)
(649615)
Rp. 6,959,853,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Tiket - Uang Harian - Uang Harian Fullboard - Penginapan	2.0 OK 4.0 OH 4.0 OH 6.0 OH	2,800,000 530,000 130,000 500,000	11,240,000 5,600,000 2,120,000 520,000 3,000,000	RM
J	Layanan Rumah Tangga Pimpinan			13,200,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - ATK/Komputer Supplies	1.0 PKT	500,000	500,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) > Perjalanan Evaluasi Laporan Kinerja			12,700,000	RM
	- Tiket - Uang Harian - Uang Harian Fullboard - Penginapan	2.0 OT 4.0 OH 4.0 OH 6.0 OH	2,500,000 595,000 130,000 800,000	5,000,000 2,380,000 520,000 4,800,000	
3987.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		6,320,443,000	
001	Gaji dan Tunjangan			4,555,239,000	U
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			4,409,886,000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14))	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	1,839,661,465 160,692,000 160,692,000	2,161,045,000 1,839,661,000 160,692,000 160,692,000	RM
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	128,000 3,000 3,000	134,000 128,000 3,000 3,000	RM
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	144,730,000 16,070,000 16,070,000	176,870,000 144,730,000 16,070,000 16,070,000	RM
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Belanja Tunj.Anak PNS - Belanja Tunj.Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj.Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	53,320,000 4,444,000 4,444,000	62,208,000 53,320,000 4,444,000 4,444,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(032)
(13)
(649615)
Rp. 6,959,853,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			30,320,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	24,560,000	24,560,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,880,000	2,880,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,880,000	2,880,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			181,520,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	170,480,000	170,480,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	11,040,000	11,040,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			14,815,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	14,697,000	14,697,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	59,000	59,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	59,000	59,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			156,675,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	156,675,000	156,675,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			391,000,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	391,000,000	391,000,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			22,300,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	22,300,000	22,300,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			130,000,000	RM
	- Belanja Uang Lembur	1.0 THN	130,000,000	130,000,000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			1,082,999,000	RM
	- Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai	1.0 THN	1,082,999,753	1,082,999,000	
B	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK			145,353,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			44,856,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	12.0 BLN	3,204,000	38,448,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,204,000	3,204,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,204,000	3,204,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			1,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12.0 BLN	20	1,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(032)
(13)
(649615)
Rp. 6,959,853,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK - Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	12.0 BLN 1.0 BLN 1.0 BLN	320,360 320,360 320,360	4,484,000 3,844,000 320,000 320,000	RM
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Belanja Tunjangan Anak PPPK - Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	12.0 BLN 1.0 BLN 1.0 BLN	128,144 128,144 128,144	1,793,000 1,537,000 128,000 128,000	RM
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	12.0 BLN 1.0 BLN 1.0 BLN	540,000 540,000 540,000	7,560,000 6,480,000 540,000 540,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.0 BLN	347,616	4,171,000 4,171,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Belanja Uang Makan PPPK	12.0 BLN	888,000	10,656,000 10,656,000	RM
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Belanja Tunjangan Umum PPPK	12.0 BLN	222,000	2,664,000 2,664,000	RM
512212	<u>Belanja Uang Lembur PPPK</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Belanja Uang Lembur PPPK	1.0 THN	3,000,000	3,000,000 3,000,000	RM
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Belanja Tunjangan Kinerja PPPK	12.0 BLN	5,514,000	66,168,000 66,168,000	RM
002 A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor <i>KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</i>			1,765,204,000 <i>648,913,000</i>	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649615)	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG
ALOKASI	Rp. 6,959,853,000	

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			369,163,000	RM
	> KEPERLUAN PERKANTORAN			84,000,000	
	- Keperluan Rumah Tangga Perkantoran	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	
	- keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Lampung)	1.0 THN	30,000,000	30,000,000	
	- Keperluan Perkantoran dan Perlengkapan Perkantoran	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	
	>> PERTEMUAN/MAKAN TAMU/DELEGASI		0	30,000,000	
	- Pertemuan/Jamuan Makan/Delegasi	1.0 THN	30,000,000	30,000,000	
	> HONOR TENAGA KONTRAK			285,163,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Lampung [7 Orang x 13 BLN]	91.0 OB	3,105,000	282,555,000	
	- Askes PPNPN [7 ORG x 12 BLN]	84.0 OB	31,050	2,608,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			40,000,000	RM
	- Stiker/Line/Segel/Blanko Pelayanan Publik	12.0 BLN	2,000,000	24,000,000	
	- Percetakan Kop Surat, Amplop, DLL	1.0 PKT	10,000,000	10,000,000	
	- Biaya Materai	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			239,750,000	RM
	- Honorarium Petugas Keamanan Lampung [4 ORG x 13 BLN]	52.0 OB	3,550,000	184,600,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Lampung [1 ORG x 13 BLN]	13.0 OB	3,550,000	46,150,000	
	- Medical Check Up	10.0 PKT	900,000	9,000,000	
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA			392,442,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			216,000,000	RM
	- Langganan Listrik	12.0 BLN	18,000,000	216,000,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			108,600,000	RM
	- Langganan Internet, TV Kabel dan Gas	12.0 BLN	8,000,000	96,000,000	
	- Isi Ulang Tabung Pemadam Api Ringan (APAR)	12.0 UNT	450,000	5,400,000	
	- Langganan Petugas Sampah	12.0 BLN	200,000	2,400,000	
	- Biaya Pengiriman Pos	12.0 BLN	400,000	4,800,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			67,842,000	RM
	- Sewa Kendaraan insidentil Roda 4 (Lampung)	27.0 HARI	846,000	22,842,000	
	- Bantuan Sewa Gudang Arsip	1.0 THN	45,000,000	45,000,000	
C	PEMELIHARAAN KANTOR			470,305,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649615)	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG
ALOKASI	Rp. 6,959,853,000	

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			7,400,000	RM
	- Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Roda-4	4.0 UNT	1,300,000	5,200,000	
	- Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Roda-2	11.0 UNT	200,000	2,200,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			160,500,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Lampung)	750.0 M2	214,000	160,500,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			300,125,000	RM
	> PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR			300,125,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Lampung)	4.0 UNIT	37,020,000	117,960,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Lampung)	11.0 UNIT	5,020,000	55,220,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda-4	1.0 UNIT	20,000,000	20,000,000	
	>> PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		0	106,945,000	
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	51.0 PEG	80,000	4,080,000	
	- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	12.0 UNIT	730,000	8,760,000	
	- Pemeliharaan Printer	20.0 UNIT	690,000	13,800,000	
	- Pemeliharaan AC Split	15.0 UNIT	610,000	9,150,000	
	- Pemeliharaan AC Cassete	10.0 UNIT	1,500,000	15,000,000	
	- Pemeliharaan Genset 150 KVA	1.0 UNIT	15,000,000	15,000,000	
	- Eksploytasi Genset	1.0 UNT	20,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan dan Operasional Mesin Pemotong Rumput	1.0 UNT	2,608,000	2,608,000	
	- Pemeliharaan Alat Laboratorium	1.0 THN	10,000,000	10,000,000	
	- Pemeliharaan Server/Internet	1.0 THN	8,547,000	8,547,000	
523131	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			2,280,000	RM
	- Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Lampung)	228.0 M2	10,000	2,280,000	
D	BELANJA PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR			253,544,000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			20,970,000	RM
	- Penambah Daya Tahan Tubuh (Lampung)	1165.0 OH	18,000	20,970,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649615)	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG
ALOKASI	Rp. 6,959,853,000	

Halaman : 14

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) > PENGELOLA ANGGARAN - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) >> PENGELOLA PNB - Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta) - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta) - Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta) >> PENGELOLA SAK - Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) - Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) - Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) - Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) >> PETUGAS PENYIMPAN DAN PENGURUS BMN - Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang			183,240,000 183,240,000 36,120,000 35,040,000 15,000,000 13,080,000 48,600,000 0 4,440,000 3,600,000 11,040,000 0 2,400,000 3,600,000 2,400,000 3,600,000 0 4,320,000 4,320,000	RM
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	12.0 OB	680,000	8,160,000 8,160,000	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) >> PAKAIAN DINAS PEGAWAI - Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Lampung) - Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas - Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Lampung) - Pakaian Kerja Satpam (Lampung)			41,174,000 0 28,290,000 5,360,000 7,524,000	RM
3987.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</u>	2.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		69,705,000	
3987.EBD.952	Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG <u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</u>	1.0 Dokumen		50,823,000	
051	<u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</u> PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN			50,823,000 50,823,000	U
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.017-Bandar Lampung) - ATK/Komputer Supplies			623,000 623,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

(032)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORG

(13)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

UNIT KERJA

(649615)

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

ALOKASI

Rp. 6,959,853,000

Halaman : 15

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			50,200,000	RM
	> Perjalanan Penyusunan RKAKL			50,200,000	
	- Tiket	4.0 OK	2,500,000	10,000,000	
	- Uang Harian	16.0 OH	562,500	9,000,000	
	- Penginapan	12.0 OH	600,000	7,200,000	
	- Perjalanan Konsultasi Ke Pusat	4.0 OH	6,000,000	24,000,000	
3987.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen		18,882,000	
051	Layanan Manajemen Keuangan			18,882,000	
A	ADMINISTRASI KEUANGAN			18,882,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			612,000	2 PNP
	- ATK/Komputer Supplies	1.0 PKT	612,000	612,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			17,250,000	A PNP
	> Perjalanan Petugas SAK			17,250,000	
	- Tiket	3.0 OT	2,000,000	6,000,000	
	- Uang Harian	12.0 OH	562,500	6,750,000	
	- Penginapan	9.0 OH	500,000	4,500,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			1,020,000	A PNP
	- Transportasi	6.0 OK	170,000	1,020,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang

3. * = Blokir

BANDAR LAMPUNG, 6 Desember 2024



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ashari Syarif.S.Pi.,M.P

Pembina Tk.I/IVb 196905151995031002